DAFTAR PUSTAKA

Al-Burey, Muhammad A. (1999). *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 254- 255. Dikutip J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Alim, Muhammad. (2008). *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Annisa, *Perbedaan Atribusi, Deligasi, dan Mandat*, dalam https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-atribusi-delegasi-dan-mandate-dalam-hukum-administrasi/, diakses pada tanggal 03 september 2024, pukul 12.37

Aridhanyandi, M. Rendi. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 3, Nomor, 4.

Asshidiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Asshidiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta: Sinar Grafika.

Beaty, Lita Agusetiani. (2017). "*Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014",* Skripsi, UNNES.

Belly Isnaeni. (2021). ”*Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”*, *fakultas hukum Universitas Pamulang*, Vol 6, Nomor 2.

Budiarjo, Mariam. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Deta, Melkianus Umbu dkk. (2024). “*Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)”, Student Research* Jurnal , vol 2, Nomor. 4.

Felicia, (2022), “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi”*, Vol. 3, No. 4.

Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gandara, Moh.(2024). *”Kewenangan Atribusi, Deligasi dan Mandat”*, *Khazanah Hukum* Vol 2, Nomor 3.

HARI, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasyim, Muhammad. (1982). *Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ilyas, Adam. *Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu*, di akses dari : https://literasihukum.com/pembagian-kekuasaan-menurut-montesquieu/, pada tanggal 09 Oktober 2024, Pukul 22:25

Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*...,.

Lesmono, Ryan. *Defisi Kewenangan Menurut Para Ahli* di akses dari: https://redasamudera.id/definisi-kewenangan-menurut-para-ahli, pada tanggal 01 September 2024, Pukul 09.58.

Mahfud MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nuna, Muten dkk. (2020). "*Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat"*, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol 5, Nomer 2.

Nupu, Alfian Julio dkk. (2024). *"Kajian* Yuridis *Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Tata Usaha Negara"*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol 13, Nomor 04.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24c ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putrijianti, Aju. (2015). "*Kewenangan Serta Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan"*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 5.

Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. di akses pada tanggal 20 Desember 2024

Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurispudensi*, di akses dari : https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/, pada tanggal 26 Desember 2024, Pukul 22:25

Sjachran Basan, (1985), *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia,* Bandung: Alumni.

Sufianto, Dadang. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: AlfaBeta.

Suparto. (2016). "*Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam", Jurnal Selat*, Vol. 4, Nomor. 1.

Tanya, Bernad L. (2011). Penegakan Hukum dalam Terang Etik,. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Pasal 12 ayat (1) Tentang Administrasi Pemerintahan

Yanti, Herma dan Masriyani. (2019). "*Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi"*, *Legalitas*, Vol 11, Nomor 2.

Zallum, Abdul Qadim. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam,* Diterjemahkan oleh M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah.

Zulfikar, Fahri. *Apa yang dimaksud dengan kode etik? Ini tujuan beserta fungsinya*, dalam https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-

dimaksud-dengan-kode-etik-initujuan-beserta-fungsinya, diakses pada tanggal 03 september 2024.